

Judul : Biaya Haji direvisi
Tanggal : Rabu, 09 Maret 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 8

Biaya Haji Direvisi

Kemenkes mengharuskan calon jamaah haji 2022 sudah mendapatkan dua dosis vaksin.

■ ZAHROTUL OKTAVIANI, ALI YUSUF

JAKARTA — Pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi dipastikan akan berdampak terhadap berkurangnya biaya haji 2022. Kemungkinan besar biaya haji yang harus ditanggung per jamaah akan lebih murah dari usulan Kementerian Agama (Kemenag) yang sebesar Rp 45 juta.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid mengatakan, biaya haji 2022 pasti akan menyesuaikan perkembangan kebijakan yang berlaku, terlebih setelah Arab Saudi mencabut berbagai pembatasan yang berkaitan dengan Covid-19. Usulan yang disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu tentang biaya haji kini masih dibahas dan

dikaji oleh Komisi VIII DPR RI.

"Nanti kita akan diundang oleh DPR untuk menyampaikan hasil kajian mereka dan akan dibahas. Tapi, sangat mungkin ini (perubahan kebijakan Saudi—Red) akan menjadi faktor yang bisa meringankan jamaah. Tapi, sekarang usulan sudah di DPR sehingga kita menunggu kajiannya," kata Subhan saat dihubungi *Republika*, Selasa (8/3).

Pada 16 Februari lalu, Menag Yaqut menyampaikan usulan biaya haji ke Komisi VIII. Kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2022 kurang lebih Rp 10 juta dari biaya haji sebelumnya pada 2019 yang Rp 35 juta. Sebagian besar kenaikan itu karena adanya tambahan biaya protokol kesehatan (prokes) yang dibebankan kepada jamaah. Dari estimasi kenaikan sebesar Rp 10 juta tersebut, Rp 7,6 juta di an-

taranya untuk biaya prokes.

Subhan mengatakan, selain biaya prokes, beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan adalah selisih kurs yang berbeda dari 2019 dan 2022, biaya visa yang naik, serta pajak yang dikenakan Saudi meningkat 10 persen dari 2019. "Untuk visa, dulu per orang 300 riyal pada 2019, sekarang menjadi 403 riyal. Pajak yang dikenakan Saudi sebelumnya lima persen, kini menjadi 15 persen," ujar dia.

Meski belum ada keputusan resmi dari Kerajaan Arab Saudi tentang kepastian haji, tim dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah bertolak ke Arab Saudi untuk melakukan pendekatan dan persiapan haji pada 24 Februari lalu. Mereka sudah melakukan pengecekan gedung hotel, bus, dan dapur yang akan digunakan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebut penyesuaian biaya haji 2022 diperlukan karena ada perubahan kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi. "Bagi kami, saya selaku ketua Panja BPIH 2022 harus menyesuaikan dengan berbagai perubahan kebijakan protokol kesehatan di Arab Saudi. Penganggaran atau BPIH tahun ini memudahkan lebih efisien dibandingkan usulan yang disampaikan pemerintah," kata dia.

Jika nantinya diketahui memang tes PCR tidak lagi diperlukan selama di Saudi, Ace menyebut nantinya tidak akan ada anggaran khusus untuk itu. Atas pengumuman pelonggaran prokes dari Kerajaan Arab Saudi, ia menilai hal tersebut menyiratkan sikap optimisme terhadap pelaksanaan haji 2022. Ia juga berharap nantinya

ibadah haji bisa dilakukan dengan jumlah kuota yang cukup besar, terutama untuk Indonesia.

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj optimistis biaya haji 2022 bisa lebih murah dari usulan pemerintah. Jika rancangan biaya

haji yang diusulkan sebelumnya menggunakan landasan kenaikan biaya akibat prokes, seharusnya nilai tersebut sudah bisa dikoreksi karena adanya pelonggaran di Arab Saudi.

"Rancangan biaya yang disampaikan Menag dengan logika dipicu oleh prokes, maka ketika prokes itu dihilangkan, biaya akan langsung turun," ujar pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana mengatakan, calon jamaah haji harus sudah mendapatkan dua dosis vaksin. Jamaah juga diminta tetap mengikuti kebijakan penanggulangan Covid-19 di Indonesia sebelum dan setelah berhaji. Budi mengatakan, jumlah jamaah haji yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 sebanyak 120.769 orang atau 69,76 persen.

"Pelonggaran prokes tetap diikuti dengan pemantauan yang ketat. Oleh karena itu, jamaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi harus sudah divaksin Covid-19 dua dosis," kata Budi Sylvana.

■ ed: mas amilim huda



BERITA TERKAIT

Jamaah Umrah Diusulkan tanpa Karantina

Hlm-7

Baca juga di republika.id
Pindai QR Code ini

